



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MUNAWAR SHODIQ
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 211707

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/168 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 279.250.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.850.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.900.000
5. MOTOR, NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.675.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.079.635**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 695.004.635



III. HUTANG

Rp. 395.558.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 299.446.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.